DAKWAH DI PENTAS DEMOKRASI

Hasan Basri

(Dosen Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Kendari)

Abstrak: Dakwah merupakan upaya mengajak kepada Islam dan melaksanakan ajaran Islam. Dakwah adalah amalan yang meskipun tertinggi nilainya, tetapi sangat berat karena tujuannya adalah mengubah kondisi yang tidak islami menjadi islami. Sehingga sedikit umat Islam yang sanggup memikul tugas mulia tersebut. Dari jumlah yang sedikit itu, ada yang melakukannya sekedar berdakwah, tanpa memperhatikan metode, cara dan sarana yang digunakan apakah sesuai dengan misi dakwah atau justru bertolak belakang. Salah satu yang marak dilakukan akhir-akhir ini adalah dakwah politik dengan menggunakan jalan demokrasi. Harapannya, setelah memperoleh kursi diparlemen atau kursi kekuasaan, mereka akan mengubah sistem menjadi Islam dari dalam. Padahal, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat. Aqidah yang mendasarinya adalah pemisahan agama dari kehidupan (*secular*). Dalam demokrasi rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi, baik untuk memilih aturan apa yang akan diterapkan, siapa penguasa yang akan berkuasa atas mereka maupun memilih apa yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Sementara dalam Islam, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan syara'.

Kata kunci: demokrasi, kedaulatan rakyat.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan negara-negara di dunia. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan pemerintahan dan kedaulatan hukumnya berasal dari rakyat. Rakyatlah melalui wakil dan pemimpin yang dipilihnya yang berhak menentukan haluan Negara sekaligus jika menginginkan perubahan Negara itu. Dengan dasar ini, maka setiap yang menginginkan perubahan harus masuk menjadi pelaku dalam demokrasi untuk mengubah sesuai yang dicita-citakan. Dengan asumsi ini pula, tidak sedikit umat Islam yang menginginkan perubahan ke arah Islam menjadikan jalan demokrasi sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Mereka lalu membentuk partai politik Islam lalu ikut dalam pemilihan umum. Mereka berusaha mempengaruhi umat Islam agar memilih partai dan orang-orang yang diharapkan memperjuangkan Islam dari dalam sistem demokrasi itu. Bahkan untuk lebih mantapnya pengaruh ke masyarakat, para pegiat demokrasi ini tidak segan-segan menyebut partainya dengan partai dakwah atau partai Islam. Mereka pun mewarnai partainya dengan symbol-simbol yang identik dengan Islam, seperti warna, lambang, bendera, slogan-slogan yang mencirikan perjuangan Islam.

Benarkah dengan demokrasi umat Islam akan kembali menjalankan aturan Islamnya. Benarkan demokrasi merupakan jalan yang dapat digunakan untuk membangkitkan Islam dan umatnya? Nampaknya, perlu bagi umat Islam menyadari betul fakta demokrasi.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *dēmokratía* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *dēmos* (rakyat) dan *kratos*

(kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di Yunani Kuno, khususnya Athena.

Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Prinsip demokrasi terdiri dari: kedaulatan rakyat; pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; kekuasaan mayoritas; hak-hak minoritas; jaminan hak asasi manusia; pemilihan yang bebas, adil dan jujur; persamaan di depan hukum; proses hukum yang wajar; pembatasan pemerintah secara konstitusional; pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Dewasa ini, masih banyak orang Islam yang menganggap demokrasi sekedar musyawarah dan pemilihan penguasa, tanpa mencermati bahwa ada hal yang sangat mendasar yang terdapat dalam demokrasi yang hal itu sangat bertolak belakang dengan Islam, yakni kedaulatan rakyat. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah (artikata.com). Jadi, kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Jika kedaulatan diserahkan kepada rakyat berarti

rakyatlah yang memiliki hak tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara itu, menetapkan baik-buruk, boleh-terlarang atau halal-haram. Apakah hal ini sesuai dengan Islam yang diyakini sebagai aturan hidup?

Asal-Muasal Demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat berkumpul mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat. Baru pada 508 SM, penduduk Athena membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern.

Dalam waktu yang panjang, demokrasi sempat tidak digunakan lagi sebagai sistem pemerintahan. Lahirlah sistem monarki yang setelah Kristen diambil sebagai agama resmi di Roma dan bercampur dengan agama pagan Romawi, maka kekuasaan gereja menguat sampai mempengaruhi sistem pemerintahan. Pada sekitar abad 5-15 M, para penguasa menjadikan agama sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Terjadilah sistem pemerintahan yang otoriter berkedok agama (teokrasi: Negara agama). Kekuasaan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan dengan raja sebagai pelaksananya (Hanif Kristianto, *al-wa'ie*, No. 151: 14). Kedaulatan di tangan raja atas nama agama, sehingga suara raja adalah suara Tuhan, tidak boleh ada yang

membantah. Akhirnya, kekuasaan justru menindas rakyat, yang pada gilirannya sangat ditentang oleh rakyat.

Para filosof mempelopori penentangan terhadap kekuasaan atas agama ini yang menyebabkan terjadinya sekularisasi. Agama tetap diakui sebagai aturan dalam aspek spiritual, sementara pemerintahan negara tidak boleh dicampuri oleh agama. Negara juga tidak boleh dikendalikan oleh penguasa, tetapi rakyatlah yang harus mengendalikan negara dengan mengangkat penguasa untuk melaksanakan kehendak rakyat.

Ketika negara dipisahkan dari agama, harus ada mekanisme untuk membuat aturan yang bersumber dari rakyat. Pada saat itulah, demokrasi yang telah terkubur beberapa abad lamanya digali kembali untuk dijadikan sistem pemerintahan. Kondisi ketika itu diuntungkan dengan runtuh khilafah tahun 1924. Pasca keruntuhan khilafah, umat Islam seluruhnya terbenam dalam jajahan Barat dan Eropa. Pada saat umat Islam ingin terlepas dari penjajahan itu, masing-masing berjuang sampai mereka berhasil mendirikan negara sendiri-sendiri. Karena demokrasi sedang menjadi “trend yang dipaksakan” dunia, maka Negara-negara yang baru merdeka tersebut tidak punya pilihan kecuali mengambil demokrasi itu sebagai sistem pemerintahan mereka. Termasuk Indonesia sejak merdeka, UUD 1945 memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yakni negara yang berasaskan kedaulatan rakyat (Pembukaan UUD 1945 alenia 4).

Bahkan dengan amandemen UUD 1945 yang banyak mengubah sistem politik saat ini, demokratisasi diterapkan hampir di segala bidang. Namun begitu, perubahan-perubahan itu tidak banyak

membawa perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di tingkat masyarakat. Akibatnya, representasi keberagaman masyarakat ke dunia publik minim, yang terjadi hanya demokrasi elitis, dimana kekuasaan terletak pada sirkulasi para elit.

Asas Demokrasi

Pemerintahan demokrasi di negara manapun selalu mencerminkan paling tidak dua hal, yakni kedaulatan rakyat dan jaminan atas kebebasan umum. Kedaulatan rakyat merupakan asas terpenting dari demokrasi. Tanpa asas ini berarti demokrasi telah hilang.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah (artikata.com). Dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Dengan demikian hak tertinggi untuk mengatur negara berada di tangan rakyat (manusia). Fakta ini tentu bertolak belakang dengan Islam yang meletakkan kedaulatan di tangan Allah melalui syariat-Nya (QS. al-An'am: 57).

Meskipun demikian, dengan memperhatikan fakta pelaksanaan demokrasi, anggapan yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat justru keliru. Di Indonesia sendiri, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa dan pengusaha. Bahkan kebijakan dan keputusan pemerintah sering dipengaruhi oleh kepentingan para pemilik modal, baik lokal maupun asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun Presiden —yang katanya perpanjangan dari

kepentingan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat— bertabrakan dengan kemauan rakyat atau mayoritas rakyat.

Di Indonesia, kelompok mayoritas adalah muslim, tetapi kenyataannya yang senantiasa diuntungkan adalah kelompok non-muslim karena kekuasaan atau modal dimiliki oleh kelompok minoritas non-muslim (atau yang mengaku muslim). Jadi, secara fakta, asas kedaulatan rakyat hanya alat untuk memanfaatkan rakyat sebagai batu loncatan bagi elit politik untuk menduduki posisi dan mengumpulkan uang bagi diri dan kroni-kroninya.

Lebih dari itu, kedaulatan rakyat sebagai asas terpenting demokrasi, sangat bertentangan dengan Islam. Justru pada aspek inilah demokrasi secara nyata bertentangan dengan Islam. Dalam al-Qur'an surah al-Tawbah ayat 31 Allah swt. berfirman:

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan (QS. al-Tawbah [9]: 31).

Ibnu Katsir ketika menjelaskan maksud ayat ini mencantumkan sebuah riwayat dari Ahmad, Turmuzi, dan Ibnu Jarir:

... فدخل على رسول الله ﷺ وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية {اتخذوا
أحبارهم وورهبانهم أرباباً من دون الله} قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم فقال: «بلى إنهم حرموا
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم

...maka Adi bin Hatim masuk menemui Rasulullah saw. dan di lehernya masih tergantung salib dari perak, dan Nabi saw. membaca

ayat ini (ayat 31 surah al-taubah). Adi berkata, maka saya berkata: sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka (para alimnya dan rahib-rahib mereka). Nabi bersabda: bahkan, sesungguhnya mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, lalu diikuti oleh umatnya, maka itulah ibadah mereka kepada alimnya dan rahib-rahib mereka (Ibnu Katsir, Tafsir surah al-Taubah: 31).

Jika ada orang yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram (mengganti hukum Allah), lalu diikuti oleh orang, maka sama dengan menyembah orang itu. Dalam demokrasi, wakil-wakil rakyat bersama eksekutif berdaulat menetapkan hukum, dan faktanya banyak produk hukum yang ”membatalkan” hukum Allah swt, maka rakyat yang mengikuti aturan itu sama dengan menyembah wakil-wakil rakyat dan eksekutif yang membuat aturan tersebut.

Karena itu, Islam menetapkan kedaulatan hanya di tangan *Syari'* lewat hukum syariah (QS. al-An'am [6]: 57). Bahkan dalam Islam ditegaskan, siapa saja yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dihukumi kafir, zalim atau fasik (QS. al-Maidah [5]: 44,48,49). Apalagi jika hak untuk menetapkan hukum sendiri telah dirampas dari Allah lalu diserahkan kepada manusia. Ketika Allah telah menetapkan aturan-aturan, menegaskan halal-haramnya sesuatu, lalu wakil-wakil rakyat dengan kedaulatan di tangannya membuat aturan lain, atau membatalkan hukum dan menggantinya dengan hukum lain, maka pada saat itu, manusia telah bertindak dan menempatkan diri mereka sederajat atau lebih tinggi dari Allah swt, *nauzu billah!*

Karena asas kedaulatan rakyat inilah, maka bukan saja karena ia bukan dari Islam, tetapi dari orang kafir, tetapi lebih jauh demokrasi

merupakan sistem *batil* atau sistem *kufir*, haram secara mutlak bagi umat Islam untuk menerapkan dan menyebarkanluaskannya (Abd Qadim Zallum, 2009: 1).

Demokrasi Sistem yang Merusak

Sebagai sistem hidup buatan manusia, demokrasi bukan saja terbatas, tetapi sistem yang buruk dan siapapun cenderung menjadi buruk di dalamnya. Hanya mereka yang berusaha keras menjaga kebersihan diri terus menerus yang bisa terhindar dari pengaruh buruk itu, meski dengan risiko terlempar dari arena atau kemudian karena terdesak ia akhirnya terpaksa terlarut juga dalam suasana yang buruk itu. Kerusakan demokrasi dapat dilihat antara lain:

1. Adanya konsep trias politika, kekuasaan menjadi tumpang tindih dan berpeluang terjadinya persaingan tidak sehat atau kompromi jahat antara tiga lembaga kekuasaan. Akibatnya program pemerintah tidak akan berjalan maksimal.
2. Masa jabatan pemerintahan selalu dalam periodik (4, 5, 6 tahun) sekali dengan kampanye yang panjang, membutuhkan banyak dana, perbaikan-perbaikan itu sifatnya hanya instrumental belaka, bahkan menjadi ajang korupsi (**M. Ismail Yusanto**, mediaumat.com, 27/2).
3. Mekanisme politik yang membuat penyelenggaranya menjadi munafik. Pemimpin mengaku didukung oleh rakyat padahal mereka itu didukung oleh kapitalis, kemudian di saat menjadi penguasa, dia merasa berutang budi terhadap yang punya modal. Efeknya, pemimpin tidak takut sama dosa karena kondisi dan keadaan yang membuat mereka menjadi orang yang munafik, meski secara fitrah

keimanan orang ingin baik, tapi kondisi terjebak dalam sistem demokrasi hingga melupakan dosa itu (Habib Khalilullah bin Abu Bakar Al Habsy, *Media Umat*, Ed. 99).

4. Selain itu, dampak buruk lainnya antara lain: *Pertama*, akibat kebebasan beragama: muncul banyak aliran sesat. Di Indonesia, sejak 2001 hingga 2007, sedikitnya ada 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia (waspada.co.id, 1/11/07). *Kedua*, akibat kebebasan berpendapat: muncul ide-ide liberal seperti pendapat yang mengatakan bahwa syariah Islam, misalnya, jika diterapkan, akan mengganggu stabilitas, mengancam kemajemukan, menimbulkan disintegrasi, dan lain-lain. Mereka yang berpendapat demikian, yang jelas-jelas melecehkan Islam. *Ketiga*, akibat kebebasan kepemilikan: banyak sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh individu, swasta atau pihak asing. Sejak tahun 60-an pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968). UU ini memberikan peluang kepada perusahaan swasta untuk menguasai 49 persen saham di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN. Tahun 90-an Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 20/1994. Isinya antara lain ketentuan bahwa investor asing boleh menguasai modal di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN, hingga 95 persen. Kini, pada masa Orde Reformasi, minyak dan gas, misalnya, yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara, 92%-nya sudah dikuasai oleh asing. *Keempat*, akibat kebebasan berperilaku: tersebarluasnya pornografi dan pornoaksi. Laporan kantor berita Associated Press

(AP) menyebutkan, Indonesia berada di urutan ke-2 setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi (*Republika*, 17/7/03).

5. Bagi umat Islam, dampak paling buruk dari demokrasi adalah tersingkirnya aturan-aturan Allah (syariah Islam) dari kehidupan masyarakat.

Propaganda demokratisasi di negeri-negeri Islam pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara-negara kapitalis penjajah. Tujuan politik luar negeri dari negara-negara kapitalis itu memang menyebarkan ideologi kapitalisme mereka, dengan demokrasi sebagai derivatnya. Tersebarnya kapitalisme di dunia ini akan menguntungkan negara-negara kapitalis; mereka akan tetap dapat mempertahankan penjajahannya atas negeri-negeri Islam. “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi” (George W. Bush, 2003).

Demokrasi digunakan untuk menjauhkan kaum Muslim dari sistem Islam yang bersumber dari Allah Swt. Sebab, demokrasi menyerahkan kedaulatan ke tangan manusia, sementara dalam Islam kedaulatan ada di tangan Allah Swt. Demokrasi pun digunakan untuk memerangi kaum Muslim. Atas nama menegakkan demokrasi dan memerangi terorisme, negeri-negeri Islam diserang dan dijajah, seperti yang terjadi di Irak dan Afganistan.

Untuk menyebarluaskan demokrasi itu, negara-negara kapitalis melakukan berbagai penipuan dan kebohongan. Ide demokrasi pun dikemas sedemikian rupa sehingga tampak bagus dan memberikan harapan kepada kaum muslim. Alih-alih memberikan solusi terhadap

persoalan kaum muslim, sistem demokrasi justru memperparah kondisi kaum muslim. Penyebab persoalan kaum muslim justru adalah penerapan sistem demokrasi yang membuat mereka jauh dari aturan-aturan Allah swt. Padahal, hanya dengan penerapan aturan Islamlah kaum muslim terbebas dari berbagai persoalan dan penjajahan.

Berdakwah Melalui Demokrasi

Penjelasan di atas paling tidak menegaskan dua hal, yakni: *pertama*, bahwa demokrasi menjadikan manusia sebagai tolok ukur penetapan keputusan bahkan tolok ukur halal-haram dan baik buruk. Untuk memutuskan sesuatu, termasuk untuk ajaran melaksanakan agama perlu mendapat persetujuan manusia. *Kedua*, demokrasi sejatinya menjadi alat ideologi kapitalisme yang dikomandoi oleh Amerika untuk mencengkramkan lebih dalam lagi kekuasaannya terhadap negeri yang menerapkan demokrasi, khususnya negeri-negeri Islam. Lewat kekuatan dana dan lembaga-lembaga dunia, Amerika mengontrol dan mengendalikan negeri muslim, termasuk Indonesia.

Sejatinya, dengan meraih dukungan mayoritas umat Islam di suatu negeri, partai politik Islam bisa mewujudkan keinginnya merapkan Islam. Dengan mendudukan para wakil rakyat yang pro syariat dalam parlemen semestinya perubahan ke Islam adalah suatu hal yang mudah. Apalagi jika berhasil menempatkan tokoh Islam duduk sebagai presiden yang memiliki kekuasaan memimpin Negara. Dengan dua asumsi sederhana tersebut sangat logis jika semuanya sudah diraih, maka umat Islam bisa mengganti sistem ini dengan syariah, bahkan bisa mengganti demokrasi dengan sistem Islam, yakni khilafah.

Asumsi inilah yang tertanam dalam benak kebanyakan pegiat dakwah politik di kalangan umat Islam. Mereka sangat yakin dengan dugaan dan logika ini. Maka ramailah mereka membuat partai Islam yang bertujuan memperjuangkan Islam. Meskipun fakta menunjukkan bahwa dari pemilu ke pemilu satu persatu parpol Islam berubah haluan. Tidak lagi murni cita-cita Islamnya, tetapi bercampur dengan paham sekuler karena mereka bekerja sama dengan partai sekuler. Alasan kerja sama pun seolah-olah dapat dibenarkan karena demi meraih posisi dalam parlemen dan pemerintahan.

Asumsi tetap jadi asumsi, tetapi fakta telah menunjukkan hal lain. Bukan hanya satu negeri muslim yang telah berhasil membuat parpol Islam lalu memenangi pemilu, tetapi tidak berhasil mewujudkan cita-cita Islamnya. Bahkan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang berhasil mendudukkan anggotanya lebih separuh dari anggota parlemen Mesir ditambah mendudukkan Dr. Mursi sebagai presiden yang terpilih secara demokratis, ternyata tidak berhasil mengubah konstitusi Mesir menjadi Islam. Bukan hanya itu, presiden Mesir malah diturunkan secara tidak demokratis. Lebih jauh, Ikhwanul Muslimin justru dijadikan organisasi teroris. Padahal sejak berdirinya tahun 1928, Ikhwanul Muslimin dikenal sangat gigih berdakwah memperjuangkan Islam.

Dari sini tampak nyata, bahwa demokrasi merupakan jalan semu untuk dakwah. Bisa saja dakwah memang melalui demokrasi, tetapi penjaga demokrasi tidak pernah membiarkan demokrasi itu digunakan untuk menghancurkan dirinya karena tegaknya Islam.

Itu secara fakta. Ada hal yang lebih mendasar yang perlu dipertimbangkan. Dakwah adalah amal sebagaimana amal-amal

lainnya. Dalam Islam, amal dapat diterima dan bernilai di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas dan sesuai contoh dari Nabi saw. Menjadikan Islam sebagai sistem Negara adalah salah satu yang dituju. Akan tetapi tujuan ini tidak boleh membenarkan semua cara untuk mencapainya. Demokrasi bukan saja tidak pernah dijalani oleh Rasul Saw. dalam berdakwah, tetapi demokrasi justru sistem, cara yang bathil untuk menerapkan Islam. Kebatilannya terlihat ketika menerapkan Islam harus melalui persetujuan mayoritas rakyat di parlemen. Lebih-lebih harus mendapatkan dukungan negara kafir.

Dakwah menegakkan Islam tidak boleh ditempuh kecuali dengan jalan yang pernah dilalui dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. Jika dicermati sejarah yang membahas perjalanan dakwah Rasul, akan didapati bahwa Nabi Saw. memulai dakwahnya dengan membina kader-kader dakwah yang dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat menyadarkan mereka dengan Islam. Rasulullah saw. telah membina para kader dakwah dan melaksanakan pembinaan secara rapi. Nabi saw. mengorganisasi sahabatnya menjadi kelompok (*kutlah*) dakwah yang solid dan menjadi rumah Arqam bin Abi al-Arqam sebagai markaz dakwah yang terjadi di akhir fase dakwah sembunyi atau akhir tahun ketiga dari kenabian (Hafiz Ahmad ‘Ajjaj al-Karmi, 2012: 74).

Ketika kader telah sanggup melakukan aktivitas dakwah riil di tengah masyarakat, maka mulailah benturan dilakukan dengan cara mengungkap keburukan sistem yang ada seraya menunjukkan kebaikan sistem Islam. Pada waktu yang sama, pimpinan dakwah melakukan aktivitas yang disebut *thalab al-nusrah*. *Thalab al-nushrah* secara harfiah berarti mencari pertolongan (dukungan) untuk dakwah; supaya

dakwah yang diemban tetap eksis, sekaligus memberikan ruang kepada para pengembannya agar bisa mengemban dakwah. *Nushrah* (dukungan/pertolongan) itu bisa dibedakan menjadi dua:

1. Dalam konteks *himâyah* (perlindungan), seperti *himâyah* Abu Thalib kepada Nabi saw., Abu Daghanah kepada Abu Bakar, Wail as-Sahami kepada Umar, dan sebagainya. Tuntunan Nabi saw. menyatakan, bahwa *himâyah* ini bisa diberikan oleh orang non-Muslim.
2. Dalam konteks *istilâm al-hukm* (penyerahan mandat), seperti penolakan Nabi saw. atas mandat kekuasaan yang diberikan oleh kaum Kafir Quraisy, sebaliknya beliau menerima mandat dari kaum Muslim Anshar. Tuntunan ini menegaskan, bahwa *nushrah* dalam konteks *istilâm al-hukm* itu hanya bisa diterima jika yang memberikan adalah kaum Muslim (Hafidz Abdurrahman, *al-Wa'ie* Edisi 55).

Dukungan umat yang sudah menghendaki Islam ditambah penyerahan kekuasaan dari pemegangnya kekuasaan itulah yang akan menjamin perubahan dan penerapan Islam secara total, menyeluruh, sekaligus kokoh. Dakwah politik seperti ini tentu sulit dan menghadapi banyak rintangan, tetapi jalan inilah satu-satu yang sesuai metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., bukan dengan bekerja sama dengan sistem, apalagi masuk ke dalam sistem demokrasi.

Penutup

Dengan mengkaji fakta demokrasi, jelas bahwa ia bukan dari Islam dan tidak ada kaitannya dengan Islam. Namun, faktanya

demokrasi paling banyak digunakan oleh umat Islam di negeri-negeri mereka, ini tentu merupakan ironi. Hal ini terjadi karena umat Islam tidak lagi memiliki institusi negara yang syar'i dan mereka juga sudah sangat jauh dari pemikiran yang jernih tentang Islam. Umat Islam kehilangan pemahaman tentang Islam sebagai aturan hidup terdiri dari konsep (*fikrah*) dan metode pelaksanaan konsep (*tarīqah*). Islam sebagai konsep terdiri dari keyakinan dan syariat yang merupakan solusi pemecahan bagi seluruh masalah yang dihadapi manusia. Sedangkan metode pelaksanaan adalah sejumlah petunjuk operasional dalam rangka penerapan, pemeliharaan dan penyebaran Islam.

Di luar itu semua, umat Islam telah terjebak dalam perangkap (*intellectual and political trap*) yang sengaja dibuat oleh bangsa-bangsa barat imperialis untuk tetap mengokohkan cengkraman penjajahnya di negeri-negeri muslim yang menyimpan banyak sumber daya alam dan sumber daya pasar yang sangat menggiurkan. Akibatnya, banyak umat Islam yang merasa demokrasi yang sedang diterapkan di negerinya bias digunakan sekedar sarana untuk mewujudkan Islam. Mereka lalu membuat partai-partai politik untuk memperjuangkan Islam dengan menjadi anggota parlemen, menjadi menteri atau menjadi presiden. Mereka dengan kelatahannya mereka menyangka Islam akan bias diperjuangkan dan bahkan bisa ditegakkan dalam kerangka negara demokrasi. Sungguh suatu anggapan yang tidak faktual karena tidak ada fakta dan belum pernah terbukti; dan anggapan yang batil karena bertentangan dengan dalil.

Islam hanya bisa diterapkan dalam kerangka Islam, yakni daulah Islam atau khilafah Islam. Ini factual karena pernah wujud selama lebih

seibu tahun, sekaligus juga shahih karena dilegitimasi oleh nash shahih. Mendakwahkan Islam juga hanya bisa dilakukan dengan cara Islam yang telah dicotahkan Rasulullah saw. Metode ini juga faktual dan shahih, sehingga tidak layak seorang yang mengaku mencintai Rasul lalu mengambil jalan hidup termasuk jala dakwah selain yang pernah ditempuh oleh Rasulullah *habibuna*. *Wallahu a'lam!* <>

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Cet. 3; Bogor: Al-Azhar Press, 2010
- Buletin *al-Islam*, Ed. 379
- Hafiz Ahmad 'Ajjaj al-Karmi. *al-Idārat fī al-Aṣri al-Rasūlī Saw.*, terjemahan Utsman Zahid as-Sidani, *Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah Saw*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012
- Media Umat*, Ed. 99
- Republika*, 17/7/03
- Tafsir Ibnu Katsir, QS. al-Tawbah ayat 31.
- al-Wa'ie Edisi 55, edisi 151
- Waspada.co.id*, 1/11/07
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
- Zallum, Abdul Qadim. *Demokrasi Sistem Kufr, Haram Mengambil, Menerapkan, dan Mendakwahrkannya*. 2010